

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Undang-Undang No.32 tahun 2004 (UU No.32/2004) menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi. Dengan demikian, diharapkan pemerintah daerah mampu mengelola sumber daya yang dimiliki dan memaksimalkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akan berdampak pada pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat Handra, et. al., (2009).

Menurut Freeman (2010), anggaran adalah suatu proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik dalam menyalurkan sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Didalam anggaran akan dapat terlihat seberapa pentingnya fungsi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya yang sudah menjadi tanggung jawabnya dan faktor apa saja yang dapat mempengaruhinya.

Penyusunan anggaran dinyatakan secara jelas, spesifik, dan dapat dimengerti oleh penanggungjawab yang melaksanakannya Primadana, et. al.,(2014). Proses penyusunan anggaran dapat dinyatakan berhasil apabila

pihak yang terlibat memiliki sikap dan perilaku yang baik dalam proses penyusunan anggaran. Menurut Rahayu, et. al.,(2007) tahapan penyusunan anggaran sangat penting untuk diperhatikan, karena jika anggaran yang berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang sudah disusun diawal.

Menurut Lestari, et. al.,(1994) penyusunan anggaran yang menggunakan pendekatan partisipasi adalah pendekatan yang sangat efektif dibandingkan dengan pendekatan lainnya. Keterlibatan dan pengaruh individu dalam proses penyusunan dan menentukan penyusunan anggaran dalam setiap divisi adalah pengertian dari partisipasi anggaran. Anggaran mempunyai dampak fungsional atau disfungsi terhadap sikap dan perilaku kepada anggota organisasi. Untuk meminimalisir keadaan tersebut, maka diperlukan untuk memberi kesempatan kepada bawahan yang mau berpartisipasi dalam proses penyusunan anggaran sehingga tujuan yang akan dicapai akan dapat diterima oleh anggota organisasi yang lain.

Konsep islam mengajarkan pentingnya menjaga amanah yang diberikan seseorang tampak dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 58 yang menyatakan bahwa :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya :” Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat” . (QS An-Nisa’58)

Kinerja aparatur pemerintahan daerah berkaitan dengan partisipasi penyusunan anggaran, motivasi kerja, dan gaya kepemimpinan. Jika gaya kepemimpinan baik, maka kinerja pemerintahan daerah juga semakin baik dan dapat mempengaruhi mekanisme dalam penyusunan anggaran yang baik dan gaya kepemimpinan juga diharapkan menjadi pengelolaan yang baik bagi masyarakat.

Disisi lain dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah yaitu perlu adanya motivasi kerja. Menurut Brantas (2009) motivasi adalah subjek yang paling penting bagi manajer, karena menurut definisi manajer harus bekerja dengan melalui orang lain. Manajer perlu paham mengenai orang-orang yang berperilaku tertentu agar dapat mempengaruhi untuk bekerja sesuai dengan yang diinginkan. Motivasi kerja adalah salah satu keahlian dalam mengarahkan karyawan agar bekerja sesuai dengan yang diinginkan dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Gaya kepemimpinan terbaik, ataupun terdapat gaya kepemimpinan yang bisa tingkatkan inovasi pemerintah dalam menggapai visi serta misinya. Dari sebagian literatur yang menggambarkan "gaya terbaik", ialah gaya yang berupaya memaksimalkan produktivitas manusia serta aksi satisf dalam bermacam keadaan, semacam pendekatan terbaik yang diusulkan oleh Mouton (1964), dan McGregor (1960) dalam konteks Tampaknya isu kepemimpinan relevan serta senantiasa menarik buat dipelajari, paling utama kala terpaut dengan krisis keyakinan di warga.(Samad, 2013)

Sehubungan dengan perihal tersebut di atas, hasil kajian empiris menampilkan kalau keberhasilan pemerintah wilayah pasti dipengaruhi oleh sebagian aspek. Fiedler (1974) berupaya menanggapi persoalan dengan menampilkan 3 elemen dalam suasana kerja yang akanmenentukan style kepemimpinan yang efisien. Ketiga elemen tersebut merupakan ikatan antara pimpinan serta bawahan, struktur tugas, serta posisi kekuasaan pemimpin. Ikatan antara pemimpin serta bawahan merupakan aspek berarti yang sangat pengaruhi kekuatan kepemimpinan serta daya guna. Bila pemimpin serta bawahan silih menghormati, hingga pemimpin ataupun manajer tidak butuh mengadopsi perilaku otoriter. Sedangkan pengelola tidak disukai, dia wajib memusatkan serta mendesak bawahannyauntuk melakukan tugas kelompok.(Samad, 2013)

Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dapat dilihat dari Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dengan adanya SAKIP sangat membantu untuk menciptakan kebersamaan dan integritas disetiap Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) untuk membuat program dimana bukan hanya sekedar perencanaan saja, tetapi juga pelaksanaan dan evaluasi.

Tabel 1. 1

Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun

Tahun	Predikat
2017	B
2018	B
2019	B
2020	BB

Sumber : <https://madiunkab.go.id>

Dalam laman berita pada website resmi madiunkab.go.id, Kabupaten Madiun pada tahun 2017 – 2019 mendapatkan predikat B untuk SAKIP secara berturut-turut dan pada tahun 2020 kabupaten mendapatkan predikat yang signifikan yaitu mendapat predikat BB. Hal ini ditunjukkan dengan adanya efisiensi dan efektivitas dalam program-program yang dijalankan selama setiap

tahunnya. Selain itu juga, Pemerintah Kabupaten Madiun terus berusaha mengupayakan inovasi yang produktif dengan mengedepankan aspek layanan dan berorientasi pada hasil.

Beberapa bukti empiris menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran dapat berpengaruh signifikan Ayunda, et. al.,(2016) atau tidak signifikan mempengaruhi kinerja manajerial (Nanik, 2017). Selain itu, bukti empiris juga menunjukkan bahwa motivasi kerja berpengaruh signifikan Saiyid, et. al., (2016) walaupun menurut Hariyanto (2017) motivasi kerja tidak berpengaruh signifikan.

Berdasarkan latar belakang, maka penelitian ini berjudul “**Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun dengan Gaya Kepemimpinan sebagai Variabel Moderasi**”.

Penelitian tentang Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah sebelumnya sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Oleh karena itu dalam penelitian saya mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh (Listyowati,2018). Dalam penelitiannya yang digunakan adalah variabel Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi, dan Good Government Governance Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Pada penelitian ini saya merubah variabel dan menggantinya dengan variabel Partisipasi Penyusunan

Anggaran dan Motivasi Kerja. Dalam penelitian ini juga saya menambahkan variabel moderasi yaitu Gaya Kepemimpinan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah Partisipasi Penyusunan Anggaran berpengaruh positif terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah?
2. Apakah Motivasi Kerja berpengaruh positif terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah?
3. Apakah Gaya Kepemimpinan mempengaruhi hubungan Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah?
4. Apakah Gaya Kepemimpinan memperkuat pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan mendapatkan bukti secara empiris pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja organisasi pemerintahan daerah.
2. Untuk menguji dan mendapatkan bukti secara empiris pengaruh motivasi kerja terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah.

3. Untuk menguji dan mendapatkan bukti secara empiris pengaruh gaya kepemimpinan terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah.
4. Untuk menguji dan mendapatkan bukti secara empiris pengaruh gaya kepemimpinan terhadap hubungan motivasi kerja terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi secara teoritis maupun praktis bagi berbagai pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan dalam bidang sektor publik. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur dan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai kinerja organisasi pemerintahan daerah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan bahan pertimbangan mengenai partisipasi penyusunan anggaran dan motivasi kerja terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah.

b. Bagi Masyarakat

Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai partisipasi penyusunan anggaran dan motivasi kerja.

c. Bagi Peneliti

Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan kepada peneliti serta dapat memahami persepsi partisipasi penyusunan anggaran, motivasi kerja, dan gaya kepemimpinan.